

AGENDA PERIKANAN 2004 : IMPLEMENTASI GERBANG MINA BAHARI

Ada momentum penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan (KP) di penghujung 2003. Yakni, berupa penancangan Gerakan Pembangunan (Gerbang) Mina Bahari atau GMB di Teluk Tomini oleh Presiden Megawati. Pemerintah memprediksi, dengan GMB diharapkan produksi perikanan tahun 2006 mencapai 9,5 juta ton dari 4,5 juta ton pada 2002. Nilai devisa dari ekspor tahun 2005 diperkirakan 10 miliar dollar AS, dari 2 miliar dollar AS pada tahun 2002. Penyerapan tenaga kerja minimal 7,4 juta orang. Ini merupakan upaya pemerintah untuk membuktikan bahwa sektor kelautan dan perikanan mampu berperan penting dalam pambangunan ekonomi. Ukuran-ukuran kuantitatif tersebut memang penting secara politis, namun jangan sampai menjebak pemerintah untuk membangun sektor ini hanya dengan bertumpu pada kekuatan usaha besar. Ingat, bahwa misi pembangunan adalah **m e n i n g k a t k a n** kesejahteraan nelayan, sehingga secara riil yang mesti diwujudkan oleh GMB pertama kali adalah



kesejahteraan nelayan. Dan, tahun 2004 ini adalah masa yang menentukan. Lalu, terobosan dan akselerasi apa yang diperlukan dalam mensukseskan GMB tersebut ? Tulisan ini hanya menyoroti dimensi ekonomi dari dua dimensi GMB lainnya, yakni ekologi dan sosial.

Tiga Kekuatan

Ada tiga kekuatan yang patut diberdayakan dan disinergikan dalam imple-mentasi GMB, yaitu:

**..... PENYERAPAN TENAGA KERJA MINIMAL 7,4 JUTA ORANG
UKURAN-UKURAN KUANTITATIF TERSEBUT MEMANG PENTING SECARA POLITIS, NAMUN JANGAN SAMPAI MENJEBAK PEMERINTAH UNTUK MEMBANGUN SEKTOR INI HANYA DENGAN BERTUMPU PADA KEKUATAN USAHA BESAR. INGAT, BAHWA MISI PEMBANGUNAN ADALAH MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN, SEHINGGA SECARA RIIL YANG MESTI DIWUJUDKAN OLEH GMB PERTAMA KALI ADALAH KESEJAHTERAAN NELAYAN.**

pasar (*market*), negara (*state*), dan masyarakat (*civil society*). *Pertama*, pasar. Kesejahteraan nelayan hanya bisa tercapai kalau tercipta pasar yang adil. Selama ini yang ada adalah pasar input yang oligopsolis dan pasar output yang oligopsonis yang menjepit nelayan kecil yang kini mencapai 90%. Sementara 10% persen lainnya adalah swasta besar. Ketimpangan struktur pelaku usaha dan ketidakadilan pasar tersebut mesti dipecahkan melalui sistem bisnis perikanan terpadu berbasis masyarakat. Yakni, sistem yang mengintegrasikan kegiatan produksi, peng-

olahan, dan pemasaran untuk produk perikanan unggulan, seperti udang, tuna/cakalang, kerapu,

*) Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, sedang studi di Kagoshima University Jepang

mutiara, rumput laut, dan lain sebagainya. Untuk itu nelayan mesti memacu produktivitas dan mutu melalui inovasi teknologi dan peningkatan skala usaha.

Tentu ciri pasar seperti itu tidak bisa berjalan sendiri. Untuk memperkuat kaitan produksi, pasca panen, dan pemasaran masih diperlukan peran swasta. Sementara ketersediaan infrastruktur, seperti prasarana transportasi, pelabuhan, irigasi, dan telekomunikasi sebagai daya tarik investasi merupakan bentuk subsidi tak langsung. Apakah subsidi langsung ke nelayan kecil masih diperlukan guna menguatkan posisi nelayan di pasar? Dalam jangka pendek masih perlu, khususnya untuk mereposisi nelayan dari penangkap menjadi pembudidaya atau pengolah, serta mendorong penangkap untuk bergerak di laut lepas yang potensinya belum dimanfaatkan. Tentu, perbankan menjadi sangat penting posisinya dalam memberdayakan kekuatan pasar ini.

**DENGAN MENYADARI
KERAGAMAN DAN PERBEDAAN
YANG ADA DARI SATU DAERAH
DENGAN DAERAH LAINNYA SERTA
KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN
YANG ADA, MAKA GMB INI JUGA
MESTI BERSIFAT
DESENTRALISTISIK.
MEKANISME DESENTRALISASI
MENUNTUT PARTISIPASI DAERAH
YANG LEBIH BESAR DALAM
MERUMUSKAN DAN
MENGEMBANGKAN PROGRAM
SESUAI DENGAN POTENSI
(SUMBERDAYA ALAM DAN
INSTITUSI) DAN KEKHASAN LOKAL.
SEHINGGA, PUSAT TIDAK BISA LAGI
SEMENA-MENA MENGATUR
AKTIVITAS DI DAERAH.**

Singkat kata, ruang pasar adalah memang milik pelaku usaha (besar dan kecil), namun pemerintah serta masyarakat dapat membantu menciptakan ruang pasar yang kondusif bagi mobilitas vertikal nelayan. Pelaku besar dan institusi pasar lain (perbankan) sangat dituntut 'tanggung jawab sosialnya' dalam mewujudkan misi ini. Sebenarnya upaya swasta mengangkat posisi nelayan bukanlah hanya tanggung jawab sosial, tetapi merupakan tuntutan pasar. Ketika swasta mengabaikan hal ini, suatu saat pasar akan timpang dan problem sosial yang merugikan swasta itu sendiri akan muncul. Jadi, 'tanggung jawab' sosial ini mestinya merupakan bagian dari 'rasionalitas pasar'.

Kedua, pada tingkat negara, mesti dipahami bahwa ciri suatu gerakan nasional adalah adanya sinergi dan dukungan lintas sektor/instansi secara sistematis dan terpadu dalam mendukung berjalannya pasar yang adil. Ibarat sebuah kesebelasan yang menerapkan strategi "total football", maka

Megawati adalah kapten yang mengatur dan mengarahkan seluruh potensi sumberdaya baik intelektual, finansial, dan sumberdaya fisik dan non fisik lainnya untuk kemajuan sektor KP. Sebagai striker, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mesti mendapat dukungan penuh dari instansi lainnya, baik yang bergerak di ristek, fiskal, infrastruktur, jaringan perdagangan internasional, sistem peradilan, serta keamanan. GMB merupakan suatu strategi permainan yang mempercepat pola kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan lintas lini tersebut. Adapun, DPR berfungsi sebagai wasit yang mengawasi jalannya pertandingan agar transparan dan memiliki akuntabilitas. Juga dapat memberikan hadiah tendangan bebas dan penalti berupa dukungan persetujuan anggaran pembangunan sektor KP. Dan, permainan akan ditonton rakyat banyak. Sebagai penonton rakyat bisa saja memuji atau mencaci maki permainan yang dipimpin Megawati ini, tergantung kualitas permainannya.

Dengan menyadari keragaman dan perbedaan yang ada dari satu daerah dengan daerah lainnya serta kompleksitas permasalahan yang ada, maka GMB ini juga mesti bersifat desen-tralististik. Mekanisme desentralisasi menuntut partisipasi daerah yang lebih besar dalam merumuskan dan mengembangkan program sesuai dengan potensi

(sumberdaya alam dan institusi) dan kekhasan lokal. Sehingga, pusat tidak bisa lagi semena-mena mengatur aktivitas di daerah. Karena itu, yang diperlukan saat ini adalah adanya harmonisasi kebijakan antara pusat-daerah. Dan, harmonisasi itu dapat tercipta bila pusat punya pedoman, rambu-

rambu, pagar yang cukup jelas untuk diterjemahkan daerah.

K e t i g a, masyarakat sipil, yang bertumpu pada kekuatan LSM, universitas, serikat nelayan, serta asosiasi pengusaha. GMB mesti mereka maknai sebagai sebuah momentum untuk memaksimalkan fungsi-fungsi mereka. LSM dan universitas berperan dalam pendampingan nelayan baik dalam kepentingan peningkatan produktivitas, manajemen usaha, pengelolaan sumberdaya, maupun terciptanya mekanisme kemitraan yang saling menguntungkan dan

adil. Sementara serikat nelayan dan asosiasi pengusaha sangat dibutuhkan sebagai mitra dalam formulasi kebijakan, serta sebagai pengontrol sistem pasar yang sedang dan akan berjalan. Begitu pula mereka semua sangat penting dalam membantu mendorong kembalinya etos kebaharian, gerakan cinta laut, dan lain sebagainya. Dengan demikian, GMB mestinya bukan hanya milik negara, tetapi juga milik masyarakat. Sehingga, keterlibatan unsur masyarakat dalam GMB ini menjadi mutlak.

**GMB ADALAH MOMENTUM UNTUK
MEMBANGUN SEMANGAT BERSAMA
DARI SELURUH KOMPONEN
BANGSA, SERTA MEMAYUNGI
BERBAGAI PROGRAM UNTUK
KEMAJUAN SEKTOR KP. DAN, RUH
GMB INI TERLETAK PADA KESATUAN
LANGKAH, KETERKAITAN, DAN
KEHARMONISAN PROGRAM ANTAR
SELURUH UNSUR MASYARAKAT
PERIKANAN (PEMERINTAH, LSM,
SWASTA, UNVERSITAS).**

Strategi Implementasi : Program Nasional ?

GMB adalah momentum untuk membangun semangat bersama dari seluruh komponen bangsa, serta memayungi berbagai program untuk kemajuan sektor KP. Dan, ruh GMB ini terletak pada kesatuan langkah, keterkaitan, dan keharmonisan program antar seluruh unsur masyarakat perikanan (pemerintah, LSM, swasta, universitas). Karena itu, dengan prinsip desentralisasi, daerahlah yang diharapkan bisa menetapkan program-program unggulannya sendiri, baik itu program yang diinisiasi pemerintah, nelayan, swasta, LSM, atau perguruan tinggi. Karena, merekalah memang ujung tombak pembangunan KP. Tentu setiap daerah programnya beda-beda. Sehingga, tidak perlu lagi adanya program nasional. Adanya program nasional hanyalah akan menyebabkan penyeragaman yang cenderung mengabaikan pluralitas, yang selama Orde Baru terbukti banyak menyebabkan kegagalan.

Kalau pun yang menjadi program unggulan adalah berasal dari pusat, seperti program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) atau *Sea Grant* yang selama ini didekonsentrasikan ke daerah, adalah sah sepanjang daerah yang mengusulkan dan secara obyektif layak. Gambaran implementasi GMB adalah sebagai berikut. Ketika daerah sepakat bahwa misalnya, PEMP – program pusat yang kini ada di 300 kabupaten itu — merupakan program unggulan, maka letak gerakannya adalah pada termobilisasikannya dukungan baik oleh lintas departemen, universitas/LSM, ataupun swasta. Contoh, sebagai penghasil ikan, suatu daerah kesulitan memperbaiki harga karena tidak ada industri pengolahan. Nah, nilai gerakan terletak pada semangat bersama untuk memberdayakan infrastruktur sosial yang mulai tertata, serta menyempurnakan kondisi perikanan daerah

tersebut dengan mengembangkan industri pengolahan, memperbaiki jaringan pemasaran, serta institusi sosial ekonomi lainnya untuk mendukung sistem bisnis perikanan terpadu berbasis masyarakat. Jadi, solusi bisa datang dari mana saja: swasta, universitas, LSM, perbankan atau pemerintah. Dan, tugas pemerintah pusat adalah memfasilitasi tersedianya dukungan lintas departemen, investor, perbankan, atau pasar internasional yang memang diperlukan guna memperkuat program pembangunan perikanan yang diusulkan daerah tersebut. Dengan demikian dalam GMB, semua peluang disebar kepada seluruh pihak yang siap berpartisipasi. Dan, upaya membangun sektor KP tidak lagi dimonopoli negara. Karena itu pula elemen resiko ditanggung seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara. Namun tugas negara, sekali lagi, adalah memperkecil resiko itu sehingga semakin banyak pihak yang dapat berpartisipasi memanfaatkan kesempatan membangun sektor KP.

Jadi sebenarnya terobosan dan akselereasi yang diperlukan adalah mobilisasi dukungan pasar, masyarakat dan lintas departemen yang bekerjasama, sinergis, terpadu, dan harmonis dalam menciptakan ruang pasar yang lebih kondusif. Yakni, untuk meningkat-nya kesejahteraan nelayan serta meningkatnya peran sektor KP dalam pembangunan ekonomi. Karena memang masalah kita selama ini terletak pada ketidakharmonisan dan ketidakterpaduan program antara masyarakat dan negara. Inilah momentum bersama untuk membuktikan bahwa sektor kelautan dan perikanan memang bisa menyumbang terwujudnya kemakmuran bangsa.

